



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN BADAN LEGISLASI
ATAS
PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROLEGNAS
RUU PRIORITAS TAHUN 2022 DAN PROLEGNAS RUU PERUBAHAN
KETIGA TAHUN 2020-2024 DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Tanggal 7 Desember 2021

Disampaikan oleh: Drs. H. Ibnu Multazam.
Wakil Ketua Badan Legislasi, A. 43

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yth. Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat waláfiat.

Selanjutnya perkenankan saya selaku Pimpinan Badan Legislasi atas nama Badan Legislasi menyampaikan laporan hasil penyusunan dan pembahasan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 yang dilakukan oleh Badan

Legislasi bersama Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancang UU DPD RI.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Ketentuan Pasal 105 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jo. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang menyebutkan bahwa Penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui Badan Legislasi.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Pasal 121 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa, hasil pembahasan Prolegnas antara Badan Legislasi, Alat Kelengkapan DPD RI, serta Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan.

Terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022, Badan Legislasi DPR RI telah menerima usulan RUU sebanyak 86 (delapan puluh enam) RUU yang berasal dari:

1. Komisi, Fraksi, Anggota DPR RI, dan masyarakat, sebanyak 64 (empat puluh empat) RUU;
2. Pemerintah, sebanyak 15 (lima belas) RUU; dan
3. DPD RI, sebanyak 7 (tujuh) RUU.

Terhadap 86 (delapan puluh enam) RUU tersebut di atas, Badan Legislasi DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Panitia Perancang

Undang-Undang DPD RI, sepakat untuk menggunakan parameter terhadap usulan RUU yang akan dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022, yaitu:

1. RUU yang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I;
2. RUU yang menunggu Surat Presiden (Surpres);
3. RUU yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi di Badan Legislasi DPR RI;
4. RUU yang dalam tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi di Badan Legislasi DPR RI; dan
5. RUU usulan baru yang telah tercantum dalam Prolegnas 2020-2024 dan memenuhi urgensi tertentu.

Pada akhirnya dalam Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI yang diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2021 telah memutuskan dan menyepakati hasil penyusunan dan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan evaluasi Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 sebanyak 40 (tiga puluh tiga) RUU dengan rincian, 26 (dua puluh enam) RUU diusulkan oleh DPR RI, 12 (dua belas) RUU diusulkan oleh Pemerintah, dan 2 (dua) RUU diusulkan oleh DPD RI.
2. Menetapkan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 yang semula berjumlah 247 (dua ratus empat tujuh) RUU menjadi 254 (dua ratus lima puluh empat) RUU, hal ini dikarenakan adanya:
 - a. Penarikan 2 (dua) RUU Usulan Pemerintah dari Prolegnas Tahun 2020-2024, yaitu RUU tentang Pajak Penghasilan dan RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa karena materi muatan kedua RUU telah diakomodir dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 - b. Penambahan 9 (Sembilan) RUU dalam Prolegnas Tahun 2020-2024, yaitu:
 - 4 (empat) RUU Usulan DPR, yaitu RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber

Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI, RUU tentang Wisata Khusus, dan RUU tentang Tindak Pidana Kesusilaan;

- 2 (dua) RUU Usulan Pemerintah, yaitu RUU tentang Perlelangan dan RUU tentang Penilai yang semula materinya digabung dalam RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara;
- 3 (tiga) RUU Usulan DPD RI, yaitu RUU Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, RUU tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Kerajaan Nusantara, dan RUU tentang Pemerintahan Digital.

Terhadap hasil penyusunan dan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, dapat kami laporkan bahwa berdasarkan pendapat mini fraksi-fraksi yang disampaikan juru bicara masing-masing fraksi, serta pendapat Pemerintah, semua Fraksi menyetujui secara bulat hasil penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024.

(adapun daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 sebagaimana yang sudah disampaikan kepada Bapak/Ibu Anggota.)

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah Laporan hasil penyusunan dan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, untuk selanjutnya Badan Legislasi menyerahkan kepada Rapat Paripurna yang terhormat ini untuk menetapkan sesuai dengan mekanisme penyusunan Prolegnas.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi, Anggota Panitia

Perancang Undang-Undang DPD RI, dan Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya yang telah bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan penyusunan Prolegnas ini dalam suasana yang penuh demokratis. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada kegiatan Badan Legislasi, baik dari Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Fraksi, Staf Sekretariat Badan Legislasi, dan Tim Ahli yang telah memberikan dukungan secara maksimal.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 7 Desember 2021
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
WAKIL KETUA,

Ttd

DRS. IBNU MULTAZAM.
A-43